



**Laporan Kinerja Triwulan 4
BPMP Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	3.92	3.92
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95	%	52.95	52.95
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50	Nilai	94.50	98.21

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, Target capaian output adalah 9.064 lembaga, dan sampai akhir Desember 2023 yang sudah terfasilitasi adalah 9.097 lembaga.

Capaian PDM yang termuat didalam indikatr IKK 1.1 yaitu antara lain:

No	PDM	Capaian	Serapan Anggaran
1	PDM-09 Transisi PAUD-SD	100	100



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam priode Oktober s.d Desember 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.1. yaitu :

1. Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS – SIPLah
2. Advokasi dan Bimtek Pemda dan Satuan Pendidikan terkait Optimalisasi Belajar.id dan Chromebook di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
3. penguatan komunitas belajar sebagai transformasi pendidikan dalam peningkatan literasi dan numerasi serta penguatan sistem pengawasan internal tahun 2024
4. Pemantauan Pelaksanaan Sulingjar PAUD Tahun 2024
5. Pendampingan Percepatan Peningkatan Akses Pendidikan (Program PAUD dan Wajar 12 tahun) Melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah
6. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap I TA 2024
7. Pemantauan dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan
8. Refleksi dan Evaluasi Implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024
9. Advokasi dan Pemantauan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan penerima BOSP melakukan perencanaan pada T-1
10. Advokasi Pemenuhan delapan Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Kendala/Permasalahan

1. Masih ada Satdik yang belum terintegrasi Halaman Pemetaan Pembelanjaan (HPP) pada Arkas dan SIPLah
2. Masih ditemukannya adanya satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan stabilitas jaringan internet yang belum cukup mendukung untuk proses pemanfaatan akun belajar.id dan chromebook
3. Modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan yang seyogianya bersumber dari Kemendagri (BKAD) sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan
4. Pemilihan lokasi PAUD yang melaksanakan sulingjar sebagai responden kegiatan monev.
5. Kurangnya kerjasama dan koordinasi diantara satker/SKPD dalam penanganan ATS sebagai salah satu upaya Peningkatan Akses Pendidikan
6. Kurangnya keterbukaan stake holder
7. Modul Integrasi MARKAS SIPD masih memakai modul tahun lalu, belum terbit modul terbaru tahun ini
8. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan sekolah termasuk siswa dan orang tua.
9. Satuan pendidikan penerima BOSP masih ada melakukan perencanaan pada T-1 dengan cara copi kertas kerja tahun lalu

Strategi/Tindak Lanjut

1. Dilakukan simulasi praktik saat Bimtek agar terintegrasi HPP pada Arkas dan SIPLah
2. Melakukan aktivasi secara bertahap serta dengan melibatkan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan untuk membantu aktivasi akun belajar.id peserta didik
3. Menyiapkan Sumber data Pendukung untuk merencanakan perbaikan Pembelajaran dan peningkatan Literasi dan numerasi pada Satuan Pendidikan.
4. Diharapkan Modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan yang seyogianya bersumber dari Kemendagri (BKAD) cepat tuntas, agar satdik/lembaga dalam membuat perencanaan pada kertas kerja secara online pada menu SIPD nya
5. Sekolah yang dipilih dilihat dari dashboard sulingjar dan berkoordinasi dengan dinas setempat, Untuk Kab/kota yang jauh memepersiapkan keberangkatan lebih awal, Kompetensi petugas yang belum memahami sulingjar PAUD telah di bekali materi terkait sulingjar PAUD
6. Terus melakukan Advokasi ke Pemda dan pemantauan penanganan anak tidak sekolah melalui



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Program PAUD dan Wajar 12 Tahun

7. Melaksanakan advokasi secara intens mencari solusi apabila satdik terkendala penyaluran dan pelaporan
8. Keterbukaan dalam birokrasi ditingkatkan
9. Masih memakai modul integrasi MARKAS SIPD tahun lalu
10. Dengan menebarkan dan berbagi Praktik Baik antara sekolah binaan.
11. Senantiasa diberikan penjelasan agar satdik dan disdik melakukan perencanaan sesuai dengan kondisi tahun berjalan

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

Capaian kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), Target capaian output adalah 13.702 lembaga, dan sampai akhir Desember 2023 yang sudah terfasilitasi adalah 10.480 lembaga. Kegiatan yang telah dilakukan dalam periode Juli s.d September 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.2. yaitu:

1. Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah
2. Advokasi dan Bimtek Pemda dan Satuan Pendidikan terkait Optimalisasi Belajar.id dan Chromebook di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
3. Uji Petik Indikator Kualitas Dapodik
4. Penguatan komunitas belajar sebagai transformasi pendidikan dalam peningkatan literasi dan numerasi serta penguatan sistem pengawasan internal tahun 2024
5. Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 Tahun 2025
6. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap I TA 2024
7. Pemantauan Pelaksanaan AN Jenjang SD Tahun 2024
8. Refleksi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT
9. Webinar Strategi Percepatan Penanganan ATS di Provinsi Sumatera Utara
10. Pemantauan dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan
11. Refleksi dan Evaluasi Implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024
12. Advokasi dan Pemantauan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan penerima BOSP melakukan perencanaan pada T-1
13. Identifikasi Kapasitas Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Capaian tiap PDM yang termuat didalam indikator IKK 1.1 yaitu antara lain:

No	PDM	Capaian	Serapan Anggaran
1	PDM-01 Sekolah Penggerak	99,67	99,67
2	PDM-02 Implementasi Kurikulum Merdeka	99,98	99,98
3	PDM-03A Transformasi Digital untuk SDS	99,90	99,90
4	PDM-03B Transformasi Digital untuk Pembelajaran	100	100



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5	PDM-04A Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satpen	100	100
6	PDM-04B Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik	99,99	99,99
7	PDM-05 Kemitraan Daerah dan Advokasi	95,25	95,25
8	PDM-06 Asesmen Nasional	100	100
9	PDM-07 Publikasi dan Komunikasi	99,84	99,84
10	PDM-08 Transformasi Tata Kelola dan Regulasi	99,90	99,90
11	PDM-10 Pemulihan Pembelajaran	98,42	98,42
12	PDM-11 Gerakan Sekolah Sehat	99,97	99,97
13	PDM-12 Pendidikan Inklusi	100	100
14	PDM-14 Analisis Data Pendidikan	100	100

Kendala/Permasalahan

1. Masih ada Satdik yang belum terintegrasi Halaman Pemetaan Pembelanjaan (HPP) pada Arkas dan SIPLah
2. Masih ditemukannya adanya satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan stabilitas jaringan internet yang belum cukup mendukung untuk proses pemanfaatan akun belajar.id dan chromebook
3. Operator Dapodik yang kadang berganti, Lokasi geografi satpen yang sulit dan susah sinyal, Oknum Dinas yang kurang kooperati dan Petugas BPMP yang kurang paham konten
4. Data untuk mereflesi kegiatan belum digunakan sebagai bahan merencanakan perbaikan dalam kegiatan di Kombel pembelajaran
5. Modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan yang seyogianya bersumber dari Kemendagri (BKAD) sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan
6. Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas, Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama, Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.
7. Kurangnya keterbukaan stake holder
8. Sebagian Pemda masih belum memiliki strategi pengembalian ATS ke satuan pendidikan
9. Modul Integrasi MARKAS SIPD masih memakai modul tahun lalu, belum terbit modul terbaru tahun ini
10. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan sekolah termasuk siswa dan orang tua.
11. Satuan pendidikan penerima BOSP masih ada melakukan perencanaan pada T-1 dengan cara copi kertas kerja tahun lalu
12. Kendala dalam kegiatan Identifikasi Kapasitas Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, yaitu antara lain:
 - a. Satuan pendidikan tidak seluruhnya terbiasa menata dokumen dan menjawab pertanyaan secara online dan melampirkan tautan google drive untuk dokumennya;
 - b. Tautan verifikasi isian instrumen mengalami masalah dalam menyimpan hasil verifikasi sehingga seluruh hasil kerja petugas yang sudah selesai harus diulang tanpa ada notifikasi dari sistem bahwa isian tidak tersimpan. Diketahuinya hasil kerja tidak tersimpan setelah dikonfirmasi kepada admin web;
 - c. Lokasi satuan pendidikan yang menjadi sampel ada yang berada jauh dari ibu kota Kabupaten. Ada



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

satuan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal yang harus ditempuh dalam waktu 5 jam dan harus naik getek (angkutan sungai sederhana) untuk sampai ke satuan pendidikan yang bersangkutan. Ada juga satuan pendidikan di Kabupaten Nias yang harus ditempuh berlawanan arah dan satu sekolah membutuhkan waktu dua jam pulang pergi sehingga hanya untuk perjalanan dibutuhkan waktu empat jam. Sementara waktu yang bisa dialokasikan hanya satu hari untuk dua satuan pendidikan. Ada juga satuan pendidikan di Kota Medan yang mengalami banjir dan harus dialihkan ke satuan pendidikan lain untuk dikunjungi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Dilakukan simulasi praktik saat Bimtek agar terintegrasi HPP pada Arkas dan SIPLah.
2. Melakukan aktivasi secara bertahap serta dengan melibatkan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan untuk membantu aktivasi akun belajar.id peserta didik
3. Memberikan pembekalan pada petugas BPMP, Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Cabdis
4. Menyiapkan Sumber data Pendukung untuk merencanakan perbaikan Pembelajaran dan peningkatan Literasi dan numerasi pada Satuan Pendidikan.
5. Diharapkan Modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan yang seyogianya bersumber dari Kemendagri (BKAD) cepat tuntas, agar satdik/lembaga dalam membuat perencanaan pada kertas kerja secara online pada menu SIPD nya
6. Melaksanakan advokasi secara intens mencari solusi apabila satdik terkendala penyaluran dan pelaporan
7. Sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan dinas setempat, Untuk Kab/kota yang jauh mempersiapkan keberangkatan lebih awal, Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan
8. Keterbukaan dalam birokrasi ditingkatkan
9. Memberikan praktik baik penganganan ATS dari beberapa Kab. Deliserdang, Kab. Karo dan Kota Tebing Tinggi
10. Masih memakai modul integrasi MARKAS SIPD tahun lalu
11. Dengan menebarkan dan berbagi Praktik Baik antara sekolah binaan.
12. Senantiasa diberikan penjelasan agar satdik dan disdik melakukan perencanaan sesuai dengan kondisi tahun berjalan
13. Petugas mendampingi satuan pendidikan jarak jauh sebelum hari bertugas dan pada saat bertugas untuk memastikan pengisian selesai pada saat hari bertugas yang ditetapkan, Petugas tetap menjalin komunikasi untuk membantu penyelesaian pengisian instrumen jika pada hari dikunjungi satuan pendidikan masih belum terkumpul bukti fisik nya di google drive, PIC kegiatan mengkoordinir para petugas dengan mencari dan menggunakan informasi terkait kendala aplikasi agar verifikasi tetap dapat dikerjakan di tautan alternative, Petugas mengupayakan pertemuan minimal untuk memastikan satuan pendidikan mengetahui tautan google form dan menggunakan tautan google drive sebagai lampiran jawaban "ya" pada instrumen online.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 82,5 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan, jika dibandingkan nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang juga mendapat predikat A dengan nilai 84,05, nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024 mengalami penurunan, dalam catatan rekomendasi hasil Evaluasi AKIP 2024 ada beberapa hal yang kami harus perbaiki diantaranya:

A. Perencanaan Kinerja

Agar Pimpinan BPMP Sumut memasukkan Permendikbudristek 13/2022 Renstra Kemendikbudristek



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

2020-2024 hal 59 pada Strategi kemendikbudristek terhadap pelayanan pendidikan yang prima pada huruf c, dalam Renstra BPMP SUMUT TAHUN 2020-2024 dan 2025-2029.

B. Pengukuran Kinerja

Agar pimpinan BPMP Sumut dalam Pengukuran capaian kinerja terus ditingkatkan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi, berupa hasil laporan kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan dilengkapi pendekatan matriks/katalog/format, contohnya praktik baik/mental/akhlak/mutu/karakter memakai katalog/format/matriks, sehingga mutu pendidikan dapat terukur secara komprehensif melalui katalog/format/matriks dengan kerjasama dengan mitra pembangunan (BAN SM, BGP/BBGP, dll) dan sektor swasta nasional.

C. Pelaporan Kinerja

Agar pimpinan BPMP Sumut dalam Pelaporan kinerja BPMP Prov. Sumut terus meningkatkan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi, dengan memasukkan hasil laporan kinerja dengan dilengkapi pendekatan matriks/katalog/format, contohnya praktik baik/mental/akhlak/mutu/karakter memakai katalog/format/matriks, sehingga mutu pendidikan dapat terukur secara komprehensif melalui katalog/format/matriks dengan kerjasama dengan mitra pembangunan (BAN SM, BGP/BBGP, dll) dan sektor swasta nasional.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Pimpinan BPMP Prov. Sumut selalu meningkatkan keterlibatannya sebagai pengambil keputusan Decision Maker dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Internal capaian kinerja, terlampir POS monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran, POS pengumpulan data sakiP, Laporan pengukuran kinerja TW 1 dan TW 2, Laporan Kinerja 2023, notula rapat penyusunan LAKin TW 1, dan hasil wawancara serta data responden. khususnya membuat langkah-langkah yang seharusnya dilakukan menghadapi satu evaluasi dalam realisasi anggaran dibawah target belum ada narasinya dalam notulen/laporan.

walaupun secara nilai kami mengalami penurunan tetapi kami masih mendapatkan predikat **A (Memuaskan)** Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja, kami telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan capain kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dengan indikator [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, Pada triwulan IV Tahun 2024 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan program kerja Per PIC di BPMP setiap minggunya pada hari senin
2. Pelaksanaan Kegiatan Komunitas Belajar Internal BPMP Provinsi Sumatera Utara telah teselenggara dengan baik setiap bulan
3. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi SAKIP Triwulan 4
4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 4

Kendala/Permasalahan

permasalahan yang dihadapi BPMP Provinsi Sumatera Utara Mneurut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 yaitu antara lain:

A. Perencanaan Kinerja

Permendikbudristek 13/2022 Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 hal 59 pada Strategi kemendikbudristek terhadap pelayanan pendidikan yang prima pada huruf c, belum dijabarkan dalam Renstra BPMP SUMUT TAHUN 2020-2024 dan 2025-2029.

B. Pengukuran Kinerja



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi, telah terlampir laporan pengukuran kinerja Tw 1 dan TW 2, serta tangkapan layar penggunaan aplikasi spasi kita dan aplikasi internal pengumpulan laporan kegiatan dan progres kegiatan. Namun ke depan perlu ditingkatkan lagi penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) berupa hasil laporan kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan dilengkapi pendekatan matriks/katalog/format, contohnya praktik baik/mental/akhlak/mutu/karakter memakai katalog/format/matriks, sehingga mutu pendidikan dapat terukur secara komprehensif melalui katalog/format/matriks dengan kerjasama dengan mitra pembangunan (BAN SM, BGP/BBGP, dll) dan sektor swasta nasional.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja BPMP Prov. Sumut telah memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi, telah terlampir laporan pengukuran kinerja Tw 1 dan TW 2, serta tangkapan layar penggunaan aplikasi spasi kita dan aplikasi internal pengumpulan laporan kegiatan dan progres kegiatan. Namun ke depan perlu memasukkan hasil laporan kinerja dengan dilengkapi pendekatan matriks/katalog/format, contohnya praktik baik/mental/akhlak/mutu/karakter memakai katalog/format/matriks, sehingga mutu pendidikan dapat terukur secara komprehensif melalui katalog/format/matriks dengan kerjasama dengan mitra pembangunan (BAN SM, BGP/BBGP, dll) dan sektor swasta nasional.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pimpinan BPMP Prov. Sumut selalu teribat sebagai pengambil keputusan Decision Maker dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Internal capaian kinerja, terlampir POS monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran, POS pengumpulan data saki, Laporan pengukuran kinerja TW 1 dan TW 2, Laporan Kinerja 2023, notula rapat penyusunan Lakin TW 1, dan hasil wawancara serta data responden. Namun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan menghadapi satu evaluasi dalam realisasi anggaran dibawah target belum ada narasinya dalam notulen/laporan.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

1. pada periode selanjutnya penyusunan renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2025-2029 kami akan menjabarkan strategi kemendikbudristek terhadap pelayanan pendidikan yang prima.
2. pada hasil laporan kinerja dan pengukuran capaian kinerja pada periode selanjutnya akan kami lengkapi pendekatan matriks/katalog/format, berupa praktik baik/mental/akhlak/mutu/karakter memakai katalog/format/matriks, sehingga mutu pendidikan dapat terukur secara komprehensif melalui katalog/format/matriks dengan kerjasama dengan mitra pembangunan (BAN SM, BGP/BBGP, dll) dan sektor swasta nasional.
3. pada periode selanjutnya kami akan lebih meningkatkan kualitas evaluasi kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara agar dapat mendeteksi lebih dini permasalahan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan program kerja, untuk kemudian menemukan pemecahan masalah yang efektif.
4. laporan pengukuran kinerja akan kami tingkatkan kualitasnya dengan memaparkan permasalahan yang dihadapi secara mendetail dan langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dilakukan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu 96,42
 Nilai EKA = 100 sehingga nilai NKA = 50% (96,42) + 50% (100) = 98,21 . pada tahun 2024 dari 7 indikator penilain IKPA, BPMP Provinis Sumatera Utara ada 4 indikator IKPA yang nilainya dibawah 100 dan masih perlu ditingkntkan pencapaiannya yaitu:

1. Indikator Deviasi Hal DIPA 3 yang nilainya hanya mencapai 81,74
2. Indikator Penyerapan Anggaran yang nilainya hanya mencapai 94,31
3. Indikator Belanja Kontraktual yang nilainya hanya mencapai 98,86
4. Indikator pengelolaan UP dan TUP yang nilainya hanya mencapai 98,45

Perbandingan Indikator Penilaian IKPA tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Penilaian IKPA	2023	2024	Ket
1	Revisi DIPA	100	100	
2	Deviasi Halaman III DIPA	56,67	81,74	Meningkat
3	Penyerapan Anggaran	82,45	94,31	Meningkat
4	Belanja Kontraktual	86,81	98,86	Meningkat
5	Penyelesaian Tagihan	100	100	
6	Pengelolaan UP dan TUP	98,45	98,45	
7	Dispensasi SPM	100	-	tahun 2024 ditiadakan
8	Capaian Output	100	100	
Nilai IKPA		90,68	95,85	Meningkat

Dari empat indikator diatas, jika dibandingkan perolehan pada triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan, hasil ini merupakan upaya maksimal dari pengelolaan anggaran dengan menyelaraskan Rencana Penarikan Anggaran (RPD) dengan realisasi anggaran sesuai jadwal kegiatan dari tim kerja PDM. Nilai indikator pengeloalaan UP dan TUP juga meningkat, hasil ini merupakan upaya dari peningkatan belanja melalui penggunaan kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Kendala/Permasalahan

1. Penurunan nilai indikator belanja kontraktual dari segi penurunan nilai kontrak dini karena ada kontrak yang dilaporkan pada triwulan 4.
2. Terdapat 4 indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 100 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 81,74 Penyerapan Anggaran dengan nilai 94,31 Belanja Kontraktual dengan nilai 98,86 dan pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 98,45.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja PDM terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA III
3. Meningkatkan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan nilai dari indikator pengelolaan UP dan TUP

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13702	13735	0	Rp24.860.413.000	Rp22.997.117.013	Rp1.863.295.987
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9064	9097	0	Rp553.552.000	Rp553.552.000	Rp0
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp465.000.000	Rp450.673.000	Rp14.327.000
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp27.238.938.000	Rp26.931.274.895	Rp307.663.105
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp2.211.623.000	Rp2.207.640.976	Rp3.982.024
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp224.527.000	Rp223.525.876	Rp1.001.124
Total Anggaran					Rp55.564.053.000	Rp53.363.783.760	Rp2.200.269.240

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Dalam penyusunan Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 agar menjelaskan lebih rinci terkait Permendikbudristek 13/2022 Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 hal 59 perihal strategi Kemendikbudristek terhadap pelayanan pendidikan yang prima pada huruf c.
2. Segera melakukan Penyusunan draft atau kerangka Renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dengan mengacu kepada Visi, misi, program prioritas dan Renstra Kemendikdasmen tahun 2025-2029.
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024.
4. Melakukan evaluasi internal dalam implementasi SAKIP tahun 2024.

Medan, 31 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara
 Tajuddin Idris, S.Si., M.T



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

